

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN DKI Jakarta
2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	5
	D. Sistematika Laporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. Perencanaan Strategis	8
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
	C. Pengukuran Kinerja	14
	D. Addendum Perjanjian Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	A. Capaian Kinerja Organisasi	15
	B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV	PENUTUP	53
LAMPIRAN		

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Sesuai dengan Visi DJKN dan Visi Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Kanwil DJKN DKI Jakarta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN DKI Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, perlu dijabarkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta mencapai 113.81%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholders Perspective (33,64%), Customer Perspective (22,62%) Internal Process Perspective (28,81%), dan Learning and Growth Perspective (28,73%).

Dengan disusunnya LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempumaan. Pada Tahun 2023 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dari Kementerian PAN dan RB, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2023. Atas diraihnya predikat ZI WBBM tersebut dan LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini diharapkan

dapat menjadi bahan evaluasi dan pendorong prestasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta


/ Mahmudsyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku instansi vertikal DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 KPKNL, yaitu KPKNL Jakarta I sampai dengan KPKNL Jakarta V.

Kanwil DJKN DKI Jakarta satu-satunya Kanwil DJKN yang bertempat di Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia Kanwil DJKN DKI Jakarta sehingga mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan/operasional DJKN. Oleh karena itu, dalam mensukseskan peran strategis tersebut Kanwil DJKN DKI Jakarta mengemban visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut DJKN menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

LAKIN 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing IKU dan hasil yang dicapai dari masing-masing IKU tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai :

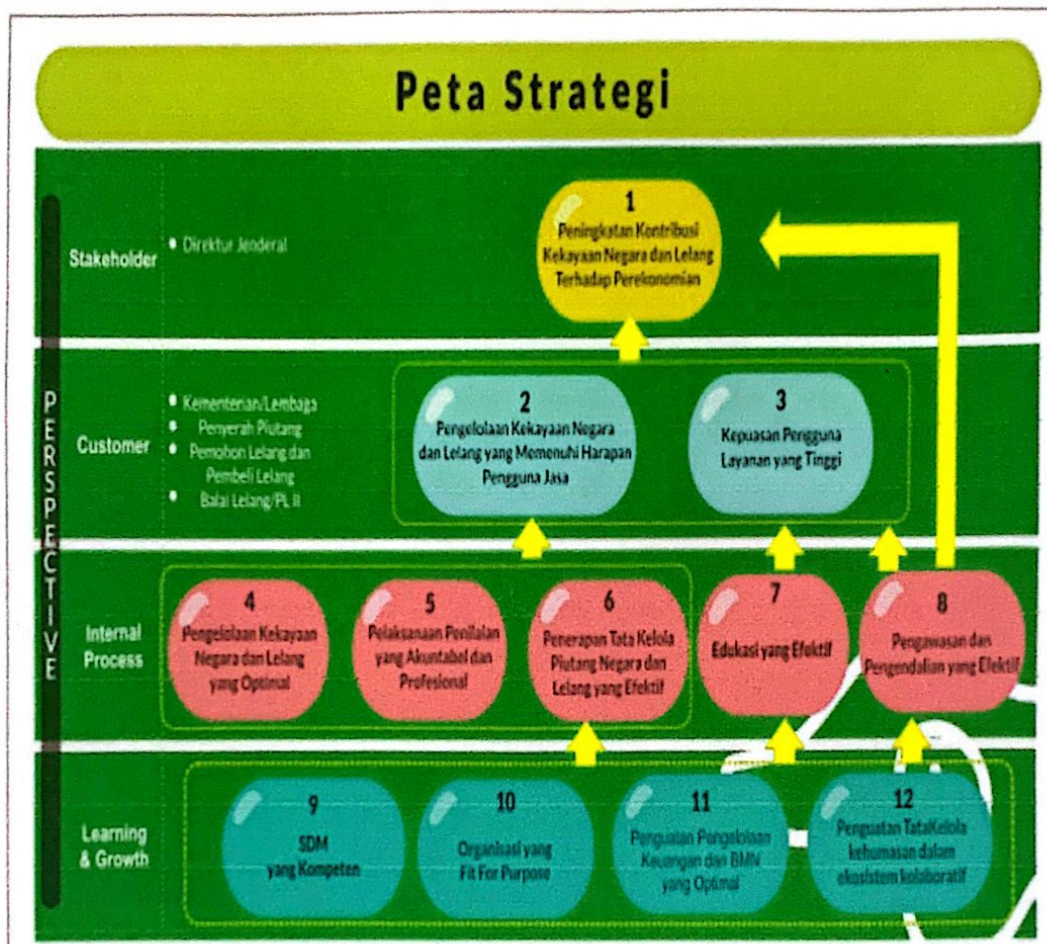
- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Untuk mengukur kinerjanya Kanwil DJKN DKI Jakarta menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif untuk

perencanaan strategis, alat untuk menterjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian kinerja berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peta Strategis.

Sasaran strategis dan IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai berikut :

Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta



Tahun 2023 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil menyelesaikan kinerjanya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 20 IKU *Kemenkeu-Two*, seluruh IKU realisasi nya dapat tercapai dan/atau melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Rincian target dan realisasi IKU *Kemenkeu-Two* tersaji sebagai berikut.

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta

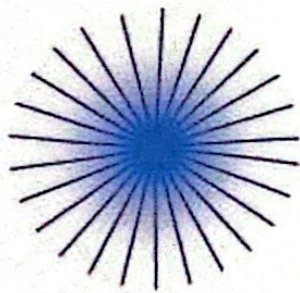
Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi 31 Des 2023	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						33.64%	
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							112.14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	125.16%	14%	30%	125.16%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	109.77%	14%	30%	137.21%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88.67	89.17	19%	40%	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						22.62%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							119.85%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	134.41%	14%	50%	134.41%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	119.70%	14%	50%	119.70%	119.70%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							106.40%	
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	E/M	100%	106.40%	21%	100%	106.40%	106.40%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28.81%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							117.67%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	80.75%	19%	37%	118.74%	118.74%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	114.89%	19%	37%	114.89%	114.89%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	131.18%	14%	27%	131.18%	120.00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	3.80%	14%	50%	184.80%	120.00%	hijau
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	87.02	14%	50%	124.31%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							115.45%	
6a-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	P/M	90%	99.82%	14%	50%	110.91%	110.91%	hijau
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	125.11%	14%	50%	125.11%	120.00%	hijau
	6a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auctional	P/M	94%	99.77%			106.13%	106.13%	
	6a2-N Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang On-Line	P/M	86%	99.87%			116.13%	116.13%	
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							107.81%	
7a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	92.71%	14%	100%	107.81%	107.81%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						28.73%	
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							116.67%	
8c-N	Tingkat Implementasi Budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100	110	14%	33%	110.00%	110.00%	hijau
	8c1-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	P/M	100	120			120.00%	120.00%	
	8c2-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu Wilayah	P/M	100	100			100.00%	100.00%	
8d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	97.63	14%	33%	122.03%	120.00%	hijau
8e-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	120%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							114.50%	
9a-N	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan BMN	P/M	100	109.00	14%	50%	109.00%	109.00%	hijau

	9a1-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA)	P/M	100%	97.99%			97.99%	97.99%	
	9a2-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120%			120%	120.00%	
9b-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	15%	0.34%	14%	50%	197.74%	120.00%	hijau
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif							113.59%	
10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif	P/M	80.00	90.87	14%	100%	113.59%	113.59%	hijau
	10a1-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60.00	81.74			136.23%	120.00%	
	10a2-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	120.00			120.00%	120.00%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113.81%	

Dengan LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempumaan. LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi
- Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta dituntut untuk melaksakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama setahun yakni untuk Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta merupakan unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara.
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian.
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan piutang negara.
4. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara.
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengelolaan piutang negara dan lelang.
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang.
10. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang.
11. Pelaksanaan penilaian dan pengelolaan piutang negara.
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan Negara.

3. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, property khusus dan usaha.

4. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang Negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini.



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang merupakan instansi vertikal unit eselon II di bawah Ditjen Kekayaan Negara didukung oleh pegawai dari berbagai keahlian.

SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
S2	0	0	3	15	18
S1 / D IV	0	1	29	1	31
D III	0	4	7	0	11
D I	0	1	3	0	4
SLTA	0	0	5	0	5
TOTAL	0	6	47	16	69

SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Kelompok Umur

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30 Tahun	0	5	0	0	5
31 – 40 Tahun	0	1	16	0	17
41 – 50 Tahun	0	0	21	9	30
> 50 Tahun	0	0	10	7	17
TOTAL	0	6	47	16	69

SDM Kanwil DJKN Jakarta sesuai Jabatan

Nama Jabatan	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	6
Eselon IV	15
Pelaksana	42
Jafung Penilai Pemerintah Ahli Madya	1
Jafung Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
Jafung Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
Jafung Pranata Keuangan APBN Mahir	1

C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi DKI Jakarta yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V. Kanwil DJKN DKI Jakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani bidang pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang mempunyai peran strategis sebagai berikut:

1. Memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset Barang Milik Negara, biaya administrasi pengurusan negara dan bea lelang.
2. Membina, mengelola, menatausahakan, dan mengamankan aset negara berupa barang jaminan.
3. Menyajikan dan melaporkan perkembangan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara.
4. Meningkatkan citra pengurusan piutang negara dan lelang.
5. Membina dan mengawasi kinerja aparatur di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Wilayah Kerja dan Pengguna Jasa Kanwil DJKN DKI Jakarta



D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi dan peran strategis instansi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, penetapan kinerja dan penjelasan tentang addendum kontrak kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, inisiatif strategis dan realisasi anggaran Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023.

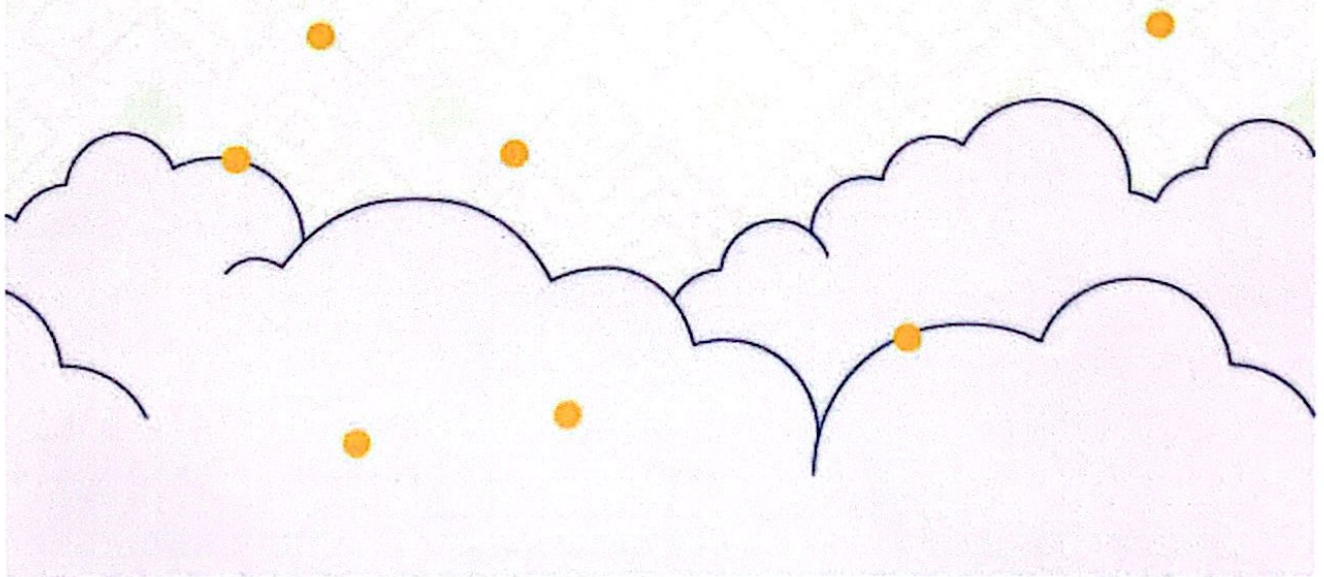
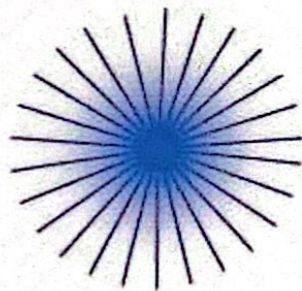
5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta selama Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta di tahun yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Penetapan / Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta tetap mengacu pada Visi yang telah ditetapkan yaitu :

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Sebagai wujud penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJKN DKI merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, adalah :
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:
 - a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga.
 - b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
 - c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
 - d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;
2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :
 - a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
 - b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai penilaian yang berkualitas adalah :
 - a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN.
 - b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi.
 - c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.
 - d. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara.
 - e. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan.
 - f. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

- g. penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- h. peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta melaksanakan "Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang".

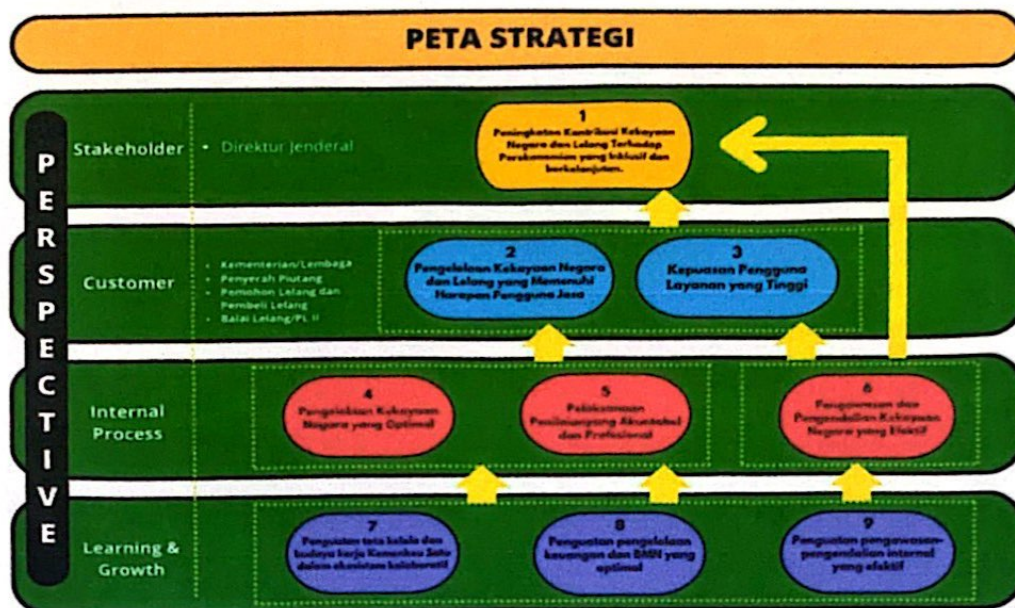
Sasaran Program (*outcome*): Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta Mampu membangun Citra Baik bagi *stakeholder*.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 (dua puluh) target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

PETA STRATEGI



Peta strategi Kantor Wilayah DJKN mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kantor Wilayah DJKN Tahun 2023 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET
Stakeholder Perspective			
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	1a - CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	1b - CP	Persentase produktivitas lelang	80%
	1c - CP	Indeks Integritas	88,67

Customer Perspective			
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a - CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
	2b - CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%
3. Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	3a - CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
Internal Process Perspective			
4. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal	4a - CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
	4b - CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
	4c - CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a - CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
	5b - N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	6a - N	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	90%
	6b - N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	7a - N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
Learning and Growth Perspective			
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8c - N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100
	8d - N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
	8e - N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	9a - N	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan BMN	100
	9b - N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	10a - N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang Efektif	80

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, Kanwil DJKN DKI Jakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen)
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

D. Addendum Perjanjian Kinerja

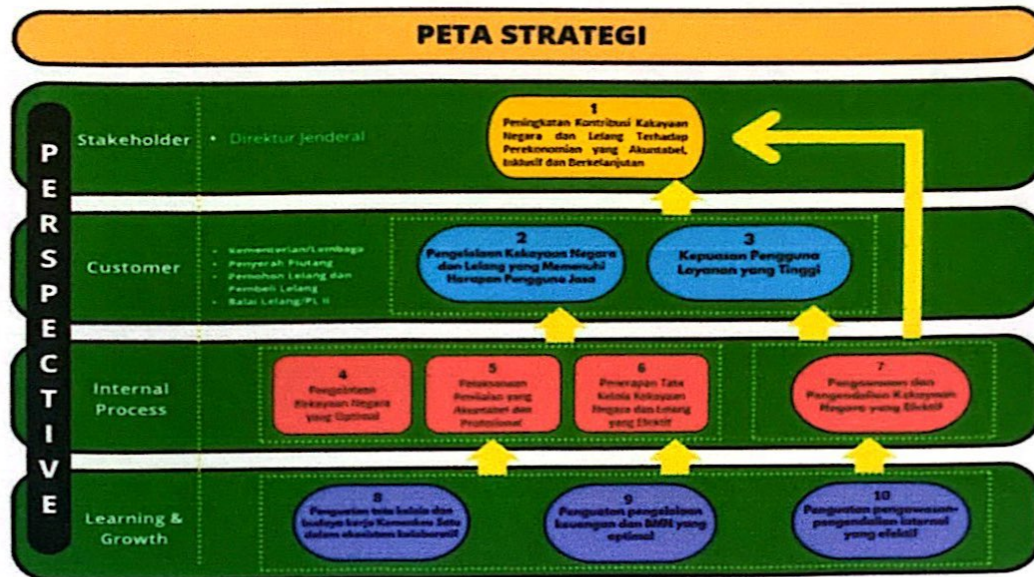
Addendum SKP merupakan perubahan sebagian pada SKP yang telah ditandatangani baik meliputi SS, IKU, target IKU, *trajectory* target dan IS. *Addendum* SKP tidak merevisi target dan indeks capaian IKU pada periode sebelumnya. *Addendum* SKP wajib dilakukan dalam hal terjadi perubahan target berupa peningkatan target tahunan pada tahun berjalan beserta *trajectory* pada periode berikutnya apabila capaian IKU pada Semester I telah mencapai/melebihi target tahunan.

Berdasarkan Peta Strategis Kanwil DJKN Jakarta tahun 2023, terdapat *Addendum* Perjanjian Kinerja Nomor: 19.1.A/KN/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023. *Addendum* Perjanjian Kinerja memuat sebagai berikut:

1. Perubahan Sasaran Strategis
2. Penambahan Sasaran Strategis
3. Perubahan Nama IKU
4. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis
5. Penambahan IKU

6. Perubahan IKU menjadi Sub-IKU
7. Penghapusan IKU
8. Perubahan Trajectory Target IKU dan Sub-IKU
9. Perubahan Kode SS dan IKU atau Sub-IKU

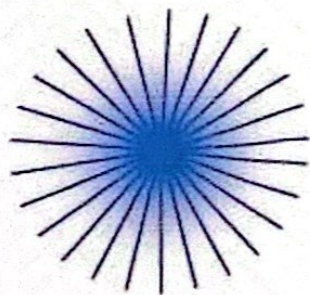
Adapun Peta Strategis setelah adanya Addendum Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:



Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengomunikasikan strategi organisasi. Perspektif Stakeholder mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Sehingga dengan adanya addendum Peta Strategis menjadikan pelaksanaan tugas dan fungsi semakin optimal dan pelayanan kepada stakeholder semakin prima.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 113,81%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta

Perspektif	2019		2020		2021		2022		2023	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	25	30	40	38,61	25	29	25	30	30	33,64
Customer	15	16,53	-	-	15	15,68	15	16,13	25	22,62
Internal Process	30	32,98	30	32,59	30	31,39	30	33,96	20	28,81
Learning & Growth	30	33,03	30	34,10	30	33,62	30	32,83	25	28,73
TOTAL NKO		112,54		105,31		109,69		112,92		113,81

Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

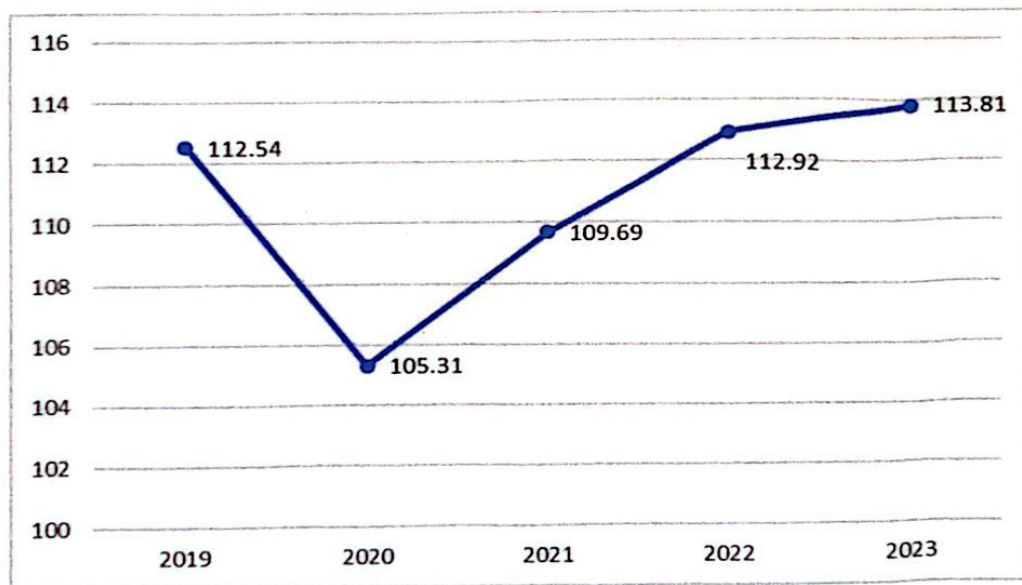
A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Selama tahun 2023, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 20 (dua puluh) IKU dengan keseluruhan IKU berstatus hijau. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :



Tren NKO Kanwil DJKN DKI Jakarta



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi 31 Des 2023	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						33.64%	
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							112.14%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	125.16%	14%	30%	125.16%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	109.77%	14%	30%	137.21%	120.00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88.67	89.17	19%	40%	100.56%	100.56%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						22.62%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							119.85%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	134.41%	14%	50%	134.41%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	119.70%	14%	50%	119.70%	119.70%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							106.40%	
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	E/M	100%	106.40%	21%	100%	106.40%	106.40%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28.81%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							117.67%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	80.75%	19%	37%	118.74%	118.74%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	114.89%	19%	37%	114.89%	114.89%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	131.18%	14%	27%	131.18%	120.00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	3.80%	14%	50%	184.80%	120.00%	hijau
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	87.02	14%	50%	124.31%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							115.45%	
6a-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	P/M	90%	99.82%	14%	50%	110.91%	110.91%	hijau
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	125.11%	14%	50%	125.11%	120.00%	hijau
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							107.81%	
7a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	92.71%	14%	100%	107.81%	107.81%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						28.73%	
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							116.67%	
8c-N	Tingkat Implementasi Budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	P/M	100	110	14%	33%	110.00%	110.00%	hijau
8d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	97.63	14%	33%	122.03%	120.00%	hijau
8e-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	120%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							114.50%	
9a-N	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan BMN	P/M	100	109.00	14%	50%	109.00%	109.00%	hijau
9b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15%	0.34%	14%	50%	197.74%	120.00%	hijau
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif							113.59%	
10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif	P/M	80.00	90.87	14%	100%	113.59%	113.59%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113.81%	

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2023 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil memperoleh NKO 113,81% dimana capaian nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2023 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. Pengurusan piutang negara; dan
- c. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- b. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

SS Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
I	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan			112,14%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	125,16%	120%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	109,77%	120%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%

a. (1a-CP) IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap pereka			
	1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	TOTAL		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 603,233,354,335 Rp 755,023,182,666
			KPKNL Jakarta I	Rp 102,120,640,105 Rp 131,820,038,927
			KPKNL Jakarta II	Rp 165,872,769,432 Rp 218,461,851,408
			KPKNL Jakarta III	Rp 71,578,086,218 Rp 82,007,149,969
			KPKNL Jakarta IV	Rp 123,060,418,027 Rp 140,262,385,712
			KPKNL Jakarta V	Rp 106,501,440,553 Rp 129,651,004,352
			Kanwil DJKN DKI (PL II)	Rp 33,800,000,000 Rp 52,820,752,298
			Persentase Realisasi PNBP	100.00% 125.16%
			Capaian IKU PNBP	125.16%

Isu Utama

Belum optimalnya penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang menyebabkan target persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang belum optimal.

Implikasi

Target persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang menjadi belum optimal.

Akar Masalah

- 1) Masih terdapat barang rusak berat pada satker yang belum diajukan persetujuan penjualan BMN.
- 2) Jumlah lelang yang laku didominasi oleh objek BMN Barang Bergerak dengan nilai limit yang relative rendah.

- 3) Daya beli masyarakat menurun.
- 4) Masih banyak penjualan BMN melalui lelang yang tidak ada peminat (TAP).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait tata cara penjualan dan pemanfaatan BMN, lelang dan piutang negara .
- 2) Menindaklanjuti permohonan persetujuan penjualan dan pemanfaatan dari satker.
- 3) Menindaklanjuti permohonan lelang dari Pemohon Lelang.
- 4) Melakukan pengurusan piutang negara secara optimal.
- 5) Mengoptimalkan pelaksanaan lelang UMKM dengan membentuk UMKM Binaan Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai upaya edukasi lelang kepada masyarakat.
- 6) Penyisiran BKPN dengan nilai yang signifikan.
- 7) Optimalisasi Lelang Barang Jaminan.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2019	100%	205,00%
2020	100%	132,65%
2021	100%	135,97%
2022	100%	169,18%
2023	100%	125,16%

b. (1b-CP) IKU Persentase Produktivitas Lelang

1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	80%	
		KPKNL Jakarta I	80%	131.25%
		KPKNL Jakarta II	80%	105.00%
		KPKNL Jakarta III	80%	136,50%
		KPKNL Jakarta IV	80%	105.00%
		KPKNL Jakarta V	80%	126.82%
		Kanwil DJKN DKI Jakarta (PL Kelas II)	80%	80.78%
		Persentase Produktivitas Total Lot laku Lelang	80%	109.77%
		Capaian IKU Produktivitas Lelang		109.77%

Isu Utama

Masih terdapat pelaksanaan lelang yang TAP (Tidak Ada Penawaran) dan dibatalkan oleh pemohon.

Implikasi

Kurang maksimalnya capaian produktivitas lelang.

Akar Masalah

Dalam pelaksanaan lelang Eksekusi UUHT Pasal 6, Kreditur mengajukan permohonan lelang sebagai salah satu strategi agar debitur segera melakukan pembayaran/pelunasan terhadap objek lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Himbauan kepada stakeholder untuk mengupayakan objek lelang yang diusulkan telah *clean & clear*.
2. Menghimbau kepada stakeholder untuk lebih optimal dalam pemasaran dan/atau menemukan peminat yang potensial sehingga objek lelang yang ditawarkan lebih optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan kepada KPKNL/PL2 untuk menghimbau para Stakeholder agar lelang yang diusulkan *clean & clear* dan melakukan upaya pemasaran sebelum diusulkan lelang.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2019	32%	50,24%
2020	34%	39,48%
2021	35%	58,48%
2022	36%	60,16%
2023	80%	109,77%

c. (1c-CP) IKU Indeks Integritas

Penilaian Integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel dan antikorupsi.

	1c-CP	P/M	Indeks Integritas	88.67	
			Indeks Integritas	88.67	89.17
			Capaian IKU		89.17

Isu Utama

1. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Implikasi

Tingkat kendali yang rendah karena pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pihak lain.

Akar Masalah

1. Terdapat faktor koreksi dimana faktor tersebut menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.
2. Survey dilaksanakan secara nasional pada level eselon I, dimana hasilnya dijadikan realisasi unit vertikal DJKN.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Penguatan integritas didalam internal unit
2. Penguatan pengawasan kepatuhan untuk memitigasi terjadinya Tindakan fraud berupa OTT dari IBI atau KPK.
3. Pengawasan secara melekat dari pimpinan unit atas pemberian pelayanan kepada *stakeholder*.

Rekomendasi Rencana Aksi

Terus melaksanakan monev secara rutin, serta meningkatkan fungsi penguatan integritas pada Kanwil DJKN DKI Jakarta.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

SS . Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			119,85%

2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	134,41%	120%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	119,70%	119,70%

a. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan			
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
			Raw Pokok Lelang	Rp 10,113,230,474,844 Rp13,593,529,619,527
			KPKNL Jakarta I	Rp 470,000,000,000 Rp 339,359,689,134
			KPKNL Jakarta II	Rp 416,100,000,000 Rp 602,826,350,825
			KPKNL Jakarta III	Rp 590,000,000,000 Rp 770,201,787,941
			KPKNL Jakarta IV	Rp 2,435,000,000,000 Rp 2,396,177,355,810
			KPKNL Jakarta V	Rp 745,100,000,000 Rp 817,218,436,116
			Target/Realisasi Pokok Lelang KPKNL sub total	Rp 4,656,200,000,000 Rp 4,925,783,619,826
			Kanwil DJKN DKI (PL II)	Rp 5,457,030,474,844 Rp 8,667,745,999,701
			Persentase Realisasi Pokok Lelang	100.00% 134.41%
			Capaian IKU Realisasi Pokok Lelang	134.41%

Isu Utama

Objek lelang dengan harga limit yang tinggi sulit laku terjual.

Implikasi

Menyebabkan sebagian besar pelaksanaan lelang menjadi TAP serta banyaknya lelang batal menyebabkan target persentase realisasi pokok lelang belum optimal.

Akar Masalah

- 1) Nilai Limit masih di atas nilai pasar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli objek sejenis pada *marketplace* yang lebih murah.
- 2) Objek lelang kurang *marketable* karena harga hampir sama dengan pasaran dengan resiko yang lebih tinggi.
- 3) Terdapat banyak gugatan terhadap objek lelang yang potensial laku.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait penetapan nilai limit lelang.
- 2) Memberikan sosialisasi kepada Pemohon Lelang untuk memperhatikan batasan dalam penentuan nilai limit yaitu nilai wajar sebagai batas atas dan nilai likuidasi sebagai batas terendah.
- 3) Pemasaran lelang oleh pemohon lelang dan penyebaran informasi lelang melalui papan pengumuman/media social.
- 4) Potensi lelang PUPN pada KPKNL Jakarta I.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Penggalan potensi lelang kepada pengguna jasa lelang.
- 2) Pemasaran lelang oleh pemohon lelang.
- 3) Mitigasi terhadap gugatan lelang.

Perbandingan Realisasi IKU Realisasi Pokok Lelang

	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2019	100	7.967.704.000.000	102,74	8.091.133.603.566
2020	100	8.327.583.000.000	106,13	8.838.088.259.376
2021	100	8.983.000.000.000	113,24	10.172.471.116.741
2022	100	9.050.000.000.000	106,3	9.620.102.549.336
2023	100	5,457,030,474,844	134,41	13,593,529,619,527

b. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

		Capaian IKU Realisasi Pokok Lelang		134.41%
2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 3,395,505,000,000	Rp 4,064,322,886,235
		KPKNL Jakarta I	Rp 345,000,000,000	Rp 723,854,222,707
		KPKNL Jakarta II	Rp 400,000,000,000	Rp 503,638,463,523
		KPKNL Jakarta III	Rp 600,000,000,000	Rp 600,720,545,750
		KPKNL Jakarta IV	Rp 250,500,000,000	Rp 311,279,554,943
		KPKNL Jakarta V	Rp 1,800,005,000,000	Rp 1,924,830,099,312
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100.00%	119.70%
		Capaian IKU Outstanding PN		119.70%

Isu Utama

- 1) *Outstanding* dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang secara aturan tidak dapat diberikan keringanan hutang.
- 2) Terdapat piutang negara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Terdapat piutang yg belum cukup syarat untuk diterbitkan PSBDT.
- 4) Karakteristik BKPN Jakarta III bertumpu pada Texmaco yang nilainya tidak sebanding dengan target penurunan Outstanding BKPN KPKNL Jakarta III.

Implikasi

- 1) Target persentase penurunan nilai *outstanding* piutang negara sulit tercapai.
- 2) Tidak semua piutang negara dapat diberikan keringanan hutang karena dibatasi oleh aturan Penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara.

Akar Masalah

- 1) Beberapa debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu.
- 2) Berdasarkan PMK 11/PMK.06/2022, piutang negara dari aset kredit eks BDL tidak dapat diberikan keringanan hutang.
- 3) Kurangnya SDM yang bertugas sebagai pemeriksa pada KPKNL Jakarta III, yaitu hanya ada 1 orang pemeriksa.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Percepatan pengurusan piutang negara terhadap Penanggung Hutang/Penanggung Jawab Hutang (PH/PJH) yang telah memenuhi syarat untuk diproses ke arah Lunas atau PSBDT dengan berpedoman pada SE-02, PMK-240, PMK-163 dan PMK-11.
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Penyerah Piutang untuk mendapatkan masukan/informasi PH/PJH terkini, juga untuk rekonsiliasi data.
- 3) Mengotimalisasi kegiatan PSBDT dan lelang pada KPKNL Jakarta III, terutama aset PT Texmaco.
- 4) Pemetaan BKPN yang dapat di PSBDT pada KPKNL Jakarta III dengan estimasi potensi nilai sebesar 450 miliar rupiah.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan *tracing* kepada penyerah piutang yang sudah pailit dan diupayakan untuk dikembalikan ke penyerah piutang.
- 2) Optimalisasi *Crash Program* untuk debitur yang potensial dan memenuhi syarat.
- 3) Intensifikasi pencairan barang jaminan PH/PJH, baik secara lelang maupun nonlelang.

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A

2020	3%	0,52%
2021	100%	118,78%
2022	100%	141,8%
2023	100%	119,70%

3. Sasaran Strategis : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

SS . Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
3	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan				106.40%
	3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106.40%

a. (3a-CP) Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				
	3a-CP	E/M	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	
			Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Komponen I)	100%	104%
			KPKNL Jakarta I s.d V (Tanggung renteng)	100%	4.43
			Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL DJKN	100%	100%
			KPKNL Jakarta I s.d. V (Tanggung renteng)	100%	11
			Capaian Tindak Lanjut Rekom SKPL KPKNL Jakarta I sd V	100%	11
			Realisasi/Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Jakarta I sd V	100%	106.40%
			Capaian IKU Kepuasan Pengguna Layanan yang		106.40%

Isu Utama

Terdapat 11 Rekomendasi DJKN yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil survei SKPL pada Kementerian Keuangan pada tahun 2021.

Terdapat 2 komponen perhitungan dalam capaian IKU ini, yaitu:

- 1) Capaian SKPL DJKN pada tahun 2023.
- 2) Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi.

Implikasi

KPKNL dan Kanwil tidak memiliki kendali atas capaian komponen SKPL Eselon I sehingga sifatnya pasif.

Akar Masalah

- 1) Rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi tindak lanjut SKPL, karena tingginya load pekerjaan pada seksi teknis di KPKNL.
- 2) Dokumentasi yang telah disampaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi SKPL tidak diterima oleh Bagian Organta.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat untuk semua permohonan layanan pada KPKNL.
- 2) Membuat inovasi layanan.
- 3) Melakukan publikasi sesuai rekomendasi yang diberikan.
- 4) Kanwil mengkoordinasikan dan memonitoring tindak lanjut pada KPKNL.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengguna layanan, sehingga persepsi mereka terhadap layanan menjadi baik dan cepat.
- 2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi terkait tindak lanjut SKPL Kemenkeu.

Perbandingan IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	Target	Realisasi
2019	4,65	4,68
2020	4,66	4,71
2021	4,69	4,74
2022	4,69	4,78
2023	4,53	4,65

4. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
4	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal				117,67%
	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	118.74%	118.74%
	4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	114.89%	114.89%
	4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	131.18%	120,00%

a. (4a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	
		Target tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	80.75%
		KPKNL Jakarta I	68%	85.94%
		KPKNL Jakarta II	68%	78.79%
		KPKNL Jakarta III	68%	73.15%
		KPKNL Jakarta IV	68%	89.51%
		KPKNL Jakarta V	68%	76.34%
		Capaian IKU Kesesuaian Penggunaan BMN		80.75%

Isu Utama

Target IKU tercapai namun capaian NUP pada KPKNL Jakarta tidak tercapai.

Target pada Triwulan I 2023 adalah sebesar 0% sehingga belum muncul pada perhitungan NKO, namun berdasarkan data dari Bidang PKN, telah terdapat realisasi kesesuaian sebesar 91,54% dan jumlah capaian NUP sebesar 15 NUP.

Implikasi

Capaian kesesuaian dan capaian NUP tidak seimbang.

Akar Masalah

Target NUP maupun perhitungan sudah ditetapkan oleh Dit PKKN Kantor Pusat DJKN sehingga tidak ada pilihan bagi KPKNL untuk melakukan usulan perubahan data.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Kanwil DJKN DKI Jakarta telah melaksanakan koordinasi secara intens baik secara formal maupun informal dengan Kasi PKN KPKNL.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.

- 2) Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK.
- 3) Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	55%	60,42
2021	62%	68,83%
2022	65%	123%
2023	68%	118.74%

b. (4b-CP) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan

4b-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	
		Jumlah target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan	2667	3064
		KPKNL Jakarta I	1839	2044
		KPKNL Jakarta II	260	357
		KPKNL Jakarta III	249	306
		KPKNL Jakarta IV	75	92
		KPKNL Jakarta V	244	265
	https://docs.google.com/spreadsheets/d	Persentase realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan	100%	114.89%
		Capaian IKU Sertifikasi		114.89%

Isu Utama dan Implikasi

Tingkat kendali yang rendah terkait proses dan prosedur pada BPN dan Kantor Pertanahan.

Akar Masalah

- 1) Belum ada pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak sebelumnya atau pada bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat lain.
- 2) Penerbitan SPTJM bagi tanah pemerintah yang tidak memiliki dokumen memiliki syarat tanda tangan lurah.

- 3) Satuan kerja tidak menguasai fisik sertifikat dan mengalami kesulitan melakukan input dokumen pada aplikasi SIMAN.
- 4) Tingkat kendali rendah terkait pengadministrasian dokumen dan *timeline* kegiatan di Kantor Pertanahan.
- 5) Perbedaan prosedur pada masing-masing kantor pertanahan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Mengadakan rapat koordinasi pra penetapan target sertifikasi BMN berupa tanah dan bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) dengan satuan kerja.
- 2) Berkoordinasi dengan BPN dan Kantor Pertanahan.
- 3) Berkoordinasi dengan satuan kerja.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan *one on one meeting* antara KPKNL dengan Bidang PKN pada Kanwil DJKN DKI Jakarta sehingga monevnya dapat berjalan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan satuan kerja yang menjadi target sertifikasi BMN berupa tanah dan bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) agar segera melakukan tahapan sertifikasi sesuai ketentuan.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2023	100%	114.89%
2022	1.404	1.633
2021	180	156
2020	2	6
2019	44	49

c. (4c-CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	
		KPKNL Jakarta I	51	61
		KPKNL Jakarta II	2455	3084
		KPKNL Jakarta III	1019	1778
		KPKNL Jakarta IV	850	884
		KPKNL Jakarta V	660	798
		Target/Realisasi Penyelesaian BKPN	5035	6605
			100%	131.21%
		Capaian IKU Penyelesaian BKPN		131.18%

Isu Utama

BKPN dengan nilai penyerahan di bawah 8 juta tidak lagi diurus oleh PUPN.

Implikasi

KPKNL dengan potensi BKPN penyerahan dari rumah sakit menjadi berkurang potensinya. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara.

Akar Masalah

- 1) Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen tidak lengkap.
- 2) Penurunan kemampuan bayar dari debitur, selain itu berdampak pula pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.
- 3) Terdapat BKPN yang didukung barang jaminan namun dokumen barang jaminan tidak dikuasai dan lokasi barang jaminan tidak diketahui. Status barang jaminan belum clean and clear (dikuasai pihak ke-3, tumpang tindih, tidak jelas batas-batas bidang tanah, tidak ada sertifikat).
- 4) Barang jaminan sudah dilakukan lelang tapi sering TAP.
- 5) Masih kurangnya juru sita dan pemeriksa di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPKNL.

- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian IKU Piutang Negara.
- 3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan pengurusan Piutang Negara eks. BLBI dalam penanganan satgas BLBI.
- 4) Melaksanakan usulan pencegahan terhadap Debitur /Obligor.
- 5) Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Direktorat PNKNL dan KPKNL.
- 6) Menetapkan Surat Paksa.
- 7) Melaksanakan rapat PUPN (rapat pembahasan nilai limit).
- 8) Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
- 9) Mengoptimalkan pengurusan piutang Negara seperti penyampaian surat paksa, menerbitkan PSBDT, dan mengikuti crash program.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mengoptimalkan pengurusan piutang Negara seperti penyampaian surat paksa, menerbitkan PSBDT, dan mengikuti crash program.
- 2) Melaksanakan One on One Meeting dengan KPKNL.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPKNL.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian IKU Piutang Negara.
- 5) Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Crash Program Keringanan Utang (CPKU) Tahun 2023.
- 6) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan pengurusan Piutang Negara eks. BLBI dalam penanganan satgas BLBI.
- 7) Melaksanakan usulan pencegahan terhadap Debitur /Obligor.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase penyelesaian BKPN	Target	Realisasi
2019	100%	128,20%
2020	100 %	80,70%
2021	100%	94,71%
2022	100 %	125,1%
2023	100%	131,16%

5. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

SS . Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120%
	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	3,80%	120%
	5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	87,02	120%

a. (5a-CP) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
	5a-CP	P/M Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	
5		KPKNL Jakarta I	25%	16.08%
		KPKNL Jakarta II	25%	2.22%
		KPKNL Jakarta III	25%	0.94%
		KPKNL Jakarta IV	25%	0.01%
		KPKNL Jakarta V	25%	0.78%
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	25%	2.78%
		Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	3.80%
		Capaian IKU Deviasi Hasil Penilaian		3.80%

Isu Utama

Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Implikasi

Mengikuti pola saat ini, dimana nilai yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi antara usulan penilai pada permohonan atau nilai hasil penilaian. Permasalahan timbul apabila nilai usulan di permohonan satker lebih tinggi dari nilai hasil penilaian. Nilai wajar yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah tidak digunakan sebagai dasar persetujuan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dikarenakan nilainya lebih kecil daripada nilai usulan (indikasi nilai) dari Satker.

Akar Masalah

1. Indikasi nilai yang diusulkan oleh satker terlalu tinggi.

2. Satker tidak mempunyai pengetahuan terkait cara menghasilkan nilai indikasi yang wajar.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi dengan seksi PKN terkait dengan indikasi nilai yang disampaikan oleh Satker.
2. Rekapitulasi daftar kegiatan penilaian yang telah dilakukan dengan disertai nilai wajar hasil penilaian.
3. Berkoordinasi secara informal dan formal melalui Nota Dinas dengan Direktorat PKNSI dan Bidang PKN Kanwil DJKN DKI Jakarta terkait nilai persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN setiap bulan.
4. Penilai memperhatikan nilai usulan dalam permohonan untuk mereview hasil penilaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan seksi PKN terkait dengan indikasi nilai yang disampaikan oleh Satker.
2. Memberikan pemahaman kepada satker terkait cara penentuan indikasi nilai yang wajar pada saat survey lapangan.

Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	30%	3,85%
2021	22%	4,47%
2022	19%	2,89%
2023	25%	3,80%

- b. (5b-N) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Sb-N	P/M	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	
		KPKNL Jakarta I	70	82,63
		KPKNL Jakarta II	70	88,88
		KPKNL Jakarta III	70	76,53
		KPKNL Jakarta IV	70	94,47
		KPKNL Jakarta V	70	87,02
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	70	92,61
		Target/Realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	87,02
		Capaian IKU Penyelesaian Penilaian yang		87,02

Isu Utama

Penyelesaian permohonan penilaian tidak sesuai SOP karena jumlah permohonan yang terlalu tinggi.

Implikasi

terdapat risiko target indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien tidak tercapai.

Akar Masalah

Jumlah permohonan yang tinggi namun jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah terbatas.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Mengupayakan penyelesaian layanan penilaian pada Kanwil dan KPKNL secara tepat waktu.
2. Membuat penjadwalan tugas pelayanan untuk masing-masing Pejabat Fungsional.
3. Melaksanakan edukasi kepada KPKNL terkait SOP dan jangka waktu pelayanan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan penilaian secara individu.

Perbandingan Capaian IKU

Rata-rata Indeks Penyelesaian Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	N/A	N/A
2021	22%	4,47%
2022	19%	2,89%
2023	70%	87,02%

6. Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

SS Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			115,45%
6a-N	Tingkat pelaksanaan lelang Online	90%	99,82%	110,91%
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	125,11%	120,00%

a. (6a-N) Tingkat pelaksanaan lelang Online

IKU Persentase Pelaksanaan Lelang on-line di Kanwil terdiri dari 2 sub IKU, yaitu:

- 1) 6a1-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (Target 94%; Realisasi 99,77%)
- 2) 6a2-N Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online (Target 86%; Realisasi 99,87%)

6a-N	P/M	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	90%	
		Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	90%	99.82%
		Capaian IKU		
6a1-N	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	
		Realisasi/Target Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	99.77%
		KPKNL Jakarta I	94%	100.00%
		KPKNL Jakarta II	94%	100.00%
		KPKNL Jakarta III	94%	99.14%
		KPKNL Jakarta IV	94%	99.71%
		KPKNL Jakarta V	94%	100.00%
		Capaian Sub IKU		99.77%
6a2-N	P/M	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online		
		Persentase Target/Realisasi pelaksanaan permohonan lelang online	86%	99.87%
		Capaian Sub IKU		99.87%
		Capaian IKU Lelang On Line		99.82%

Isu Utama

Pengetahuan dan minat pemohon lelang untuk melakukan lelang online masih rendah, terutama pemohon lelang yang belum berpengalaman melakukan lelang melalui E-Auction ataupun E-Conventional.

Implikasi

Terdapat potensi pelaksanaan lelang on-line menjadi tidak optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan sosialisasi dan himbauan baik secara tertulis melalui surat Kepala Kantor maupun secara informal/lisan pada saat Pemohon Lelang melakukan konsultasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengenalkan keunggulan lelang *e-Auction* kepada Pemohon Lelang/Satker/Masyarakat Luas melalui media social.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	100%	102,74%
2021	92%	100%
2022	92%	100%
2023	90%	99,82%

b. (6b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

6b-N	P/H	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK	100%	
		A. Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	BULANAN	362	424
		KPKNL Jakarta I		59	71
		KPKNL Jakarta II		35	45
		KPKNL Jakarta III		51	52
		KPKNL Jakarta IV		51	54
		KPKNL Jakarta V		167	202
		% Aset yang Dievaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasi		100%	117%
		B. Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker		28	38
		KPKNL Jakarta I			8
		KPKNL Jakarta II			6
		KPKNL Jakarta III			11
		KPKNL Jakarta IV			9
		KPKNL Jakarta V			4
		% Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Satker		100%	158%
		TOTAL (80% komponen A + 20% komponen B)		100%	125.11%
		Capaian IKU Portofolio			125.11%

Isu Utama

Pelaksanaan kegiatan analisa portofolio aset kurang maksimal

Implikasi

Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tidak tercapai

Akar Masalah

- 1) *Load* pekerjaan satker yang cukup tinggi mengakibatkan pengisian form pendataan membutuhkan waktu yang lama.
- 2) Satker belum paham terkait pengisian form pendataan portofolio aset, sehingga terdapat kesalahan pada saat pengisian form pendataan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Koordinasi dengan satker terkait rencana pelaksanaan portofolio aset
- 2) Melaksanakan penelitian lapangan/survei.
- 3) Menyampaikan surat permintaan pengisian data pada form pendataan portofolio aset kepada Satker yang menjadi target.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Satker terkait.
- 2) Untuk Satker yang mengalami kendala dalam pengisian data di form pendataan, menjadi prioritas dilakukan penelitian lapangan.
- 3) Pelaksanaan penelitian lapangan apabila masih terdapat kekurangan data/informasi yang telah diberikan satker.

7. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**SS Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			107,81%
7a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	92,71%	107,81%

a. (7a-N) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

7. Penguasaan dan Pengendalian Keuangan Negara yang Efektif				
Ta-R	P/NI	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	AKUR/TLR	80%
		Persentase Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	SEMESTERAN	80%
A		Pembinaan Pengelolaan BMN		80%
		Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan		7
		Jumlah Peserta Pembinaan		85
		Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan dari Peserta		
B		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 dan Semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		1544
		KPKNL Jakarta I		171
		KPKNL Jakarta II		833
		KPKNL Jakarta III		165
		KPKNL Jakarta IV		169
		KPKNL Jakarta V		196
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		10
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 dan semester I 2023		1618
		KPKNL Jakarta I		193
		KPKNL Jakarta II		839
		KPKNL Jakarta III		182
		KPKNL Jakarta IV		177
		KPKNL Jakarta V		217
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		10
		Persentase Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara periode Semester II 2022 sd Semester I 2023		95.43%
Capaian IKU Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN				92.71%

Isu Utama

Terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, Satuan Kerja telah melakukan tindak lanjut persetujuan namun belum melakukan input persetujuan dan progres ke dalam aplikasi SIMAN.

Implikasi

Perhitungan realisasi terhambat, bahkan dapat tidak tercapai karena pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja tidak terpantau.

Akar Masalah

- 1) Aplikasi SIMAN belum update.
- 2) Jumlah Satker yang cukup banyak di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan setiap Satker memiliki karakteristik pengelolaan BMN yang berbeda.
- 3) Kesadaran Satker yang kurang dalam menindaklanjuti surat persetujuan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Koordinasi informal dengan satker terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset.
- 2) Mengompilasi laporan tindak lanjut dari satuan kerja.
- 3) Berkoordinasi dengan seksi pelayanan lelang terkait data pelaksanaan lelang.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mencari data Tindak Lanjut Persetujuan Penjualan BMN pada seksi Pelayanan Lelang dan tetap mengirimkan surat resmi pengisian tindak lanjut kepada satker.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian (wasdal) ke satuan kerja.
- 3) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta.
- 4) Melakukan koordinasi dengan satker atas tindak lanjut surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta.
- 5) Memonitor aplikasi SIMAN secara berkala untuk memastikan surat persetujuan pengelolaan BMN telah tuntas ditindaklanjuti. Apabila belum selesai ditindaklanjuti, diberikan surat peringatan.
- 6) Mengevaluasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	80%	84,13%
2021	85%	89,95%
2022	85%	111,25%
2023	86%	92,71%

8. Sasaran Strategis : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			116,87%
8c-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100	110%	110%

8d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	122,03%	120%
8e-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%

a. **(8c – N) Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu**

Terdapat 2 Sub IKU untuk IKU Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu, antara lain:

- 1) 8a1-CP Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan (Target 100; Realisasi 120).
- 2) 8a2-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah (Target 100; Realisasi 100).

8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif					
8c-N	P/M	Tingkat Implementasi Budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	Max/AVG	100	
		Tingkat Implementasi Budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	TRIWULANAN	100	110
Capaian IKU					
8c1-CP	P/M	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Max/AVG		
		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	SEMESTERAN	100	120
		Skala Efektivitas Ekosistem Kehumasan		3.55	4.55
Capaian Sub IKU					
8c2-N	P/M	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	Max/AVG		
		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	TRIWULANAN	100	100
		Persentase Kegiatan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu Wilayah		90%	90%
Capaian Sub IKU					
		Capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya dan kehum			110

Isu Utama

Perhitungan realisasi atas kedua sub IKU tersebut dilakukan oleh unit eksternal, yaitu Direktorat Huhu DJKN dan Kanwil Kemenkeu Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Implikasi

Perhitungan realisasi IKU mengalami keterlambatan karena menunggu hasil akumulasi dari pihak eksternal, yaitu Direktorat Hukum dan Humas dan Kanwil Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta.

Akar Masalah

Perhitungan realisasi atas kedua sub IKU tersebut dilakukan oleh unit eksternal, yaitu Direktorat Huhu dan Kanwil Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta. Seringkali Kanwil belum mendapatkan hasil perhitungan realisasi

sampai waktu pelaporan capaian kinerja sehingga pelaporan capaian IKU menjadi tidak maksimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Berkoordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta selaku koordinator kegiatan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah.
- 2) Berkoordinasi dengan Direktorat Huhu DJKN.
- 3) Melaporkan kegiatan UMKM Kanwil DJKN DKI Jakarta tepat waktu.
- 4) Melaporkan kegiatan kehumasan dengan tepat waktu.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait ekosistem kehumasan Kanwil.
- 2) Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait Implementasi Budaya Kemenkeu Satu Wilayah DKI Jakarta.

Perbandingan Capaian IKU

Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	N/A	N/A
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	100	110%

b) (8d – N) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

8d-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK	80	
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen	TAHUNAN	80	
		Kinerja Organisasi			98.8400
		Kinerja Pegawai			94.9100
		Manrisk			98.7500
		Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		80	97.63
		Capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko			97.63

Isu Utama

Reviu pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko ini membutuhkan banyak bukti dukung dimana bukti dukung tersebut tidak hanya berada di seksi KI namun juga terdapat pada seksi teknis terkait atau seksi supporting.

Implikasi

Sulitnya akses terhadap dokumen yang dipersyaratkan akan mempengaruhi nilai indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko.

Akar Masalah

Pengelolaan kinerja merupakan kegiatan yang menyeluruh dari sejak penyusunan anggaran, pelaksanaan dalam pencapaian target sampai dengan pelaporan pengelolaan kinerja dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan kinerja ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak bukti dokumen yang menunjang pembuktian pelaksanaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kualitas manajemen risiko yang membutuhkan *support* dokumen dan pelaksanaan diklat oleh pegawai di luar seksi KI mengakibatkan sulitnya mendapatkan nilai yang optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Berkoordinasi dengan seluruh seksi teknis dan subbagian umum terkait dokumentasi pengelolaan kinerja berupa KK, manual IKU, tinjuc DKO dan dokumen penyusunan anggaran.
- 2) Mendokumentasikan kegiatan rapat DKO secara triwulanan dengan baik dan upload data dukung ke drive pengelolaan kinerja.
- 3) Melaporkan LCK ke Kanwil DJKN DKI Jakarta tepat waktu dan mendokumentasikan raw data dengan baik.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pengelolaan kinerja dengan baik dan koordinasi dengan seluruh seksi teknis terkait tinjuc DKO dan bukti penyelesaiannya.
- 2) Melaksanakan seluruh tahapan manajemen risiko.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	N/A	N/A
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	100	110%

c) (8e – N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

8e-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	MAX/TLK	100%	
100%		Satker Kanwil	BULANAN	100%	
	a	Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		59	59
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		59	59
	b	Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		59	59
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		59	59
	c	Jumlah bawahan total		59	59
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		59	59
		% Capaian Utama		100.00%	100.00%
		% Capaian Tambahan		100.00%	100.00%
		% Capaian pengembangan kompetensi pegawai		120%	120%
		Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)			120.00%

Isu Utama

Realisasi capaian pengembangan kompetensi pegawai tidak maksimal karena kurangnya partisipasi aktif pegawai, sehingga target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak tercapai.

Implikasi

target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berisiko tidak tercapai.

Akar Masalah

Pegawai kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan e-learning, webinar maupun diklat sehingga target kompetensi tidak tercapai.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Pemberian Informasi kepada pegawai terkait adanya *E-Learning Open Access*.
- 2) Mengusulkan diklat bagi pegawai yang belum memenuhi kompetensi teknis.
- 3) Membuat sistem monitoring capaian yang dapat diakses mandiri oleh setiap pegawai melalui KJ Pantaw.

Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Menghimbau pegawai untuk mengikuti diklat/e-learning /Webinar dsb.
- 2) Mengusulkan diklat bagi pegawai yang belum memenuhi kompetensi teknis.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
--	--------	-----------

2019	N/A	N/A
2020	100%	120%
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	100%	120%

9. Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			114,50%
9a-N	Indeks kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	100	109,00	109,00%
9b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,34%	197,74%

a. (9a-N) Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara

Terdiri dari 2 Sub IKU, antara lain:

- 1) 9a1-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran/IKKPA (Target 100; Realisasi 97,99).
- 2) 9a2-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (Target 100%; Realisasi 120%).

9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					
9a-N	P/M	Indeks kualitas Pengelolaan Anggaran dan	Max/TLK	100		
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		100		108.71
		Capaian IKU				
9a1-CP	P/M	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK	100		
		Kanwil DJKN DKI Jakarta				93.94
		Capaian Target Indeks 95,5		95,5		93.58
		Capaian Target 100%		100%		97.99%
		Capaian Sub IKU IKKPA		100%		97.99%
		Data Untuk Keperluan Movev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU Kanwil)				
		KPKNL Jakarta I	Target 100			97.17
		KPKNL Jakarta II	Target 100			98.33
		KPKNL Jakarta III	Target 100			99.27
		KPKNL Jakarta IV	Target 100			99.79
		KPKNL Jakarta V	Target 100			
9a2-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/AVG	100%		
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	TAHUNAN	100%		120%
		Capaian Sub IKU Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%		120.00%
		Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan dan				109.00%

1) Sub IKU (9a1-CP) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran/IKKPA

Isu Utama

Target IKKPA tidak tercapai karena efisiensi yang rendah.

Implikasi

Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran tidak tercapai

Akar Masalah

- a) Nilai IKKPA tidak maksimal karena penyerapan anggaran Triwulan IV pada beberapa KPKNL tidak mencapai target.
- b) Nilai SMART DJA tidak maksimal karena efisiensi anggaran di akhir tahun rendah, adanya *refocusing* menyebabkan pagu anggaran berkurang sedangkan kebutuhan anggarannya tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- a) Menyampaikan realisasi anggaran dan capaian output setiap akhir bulan kepada seksi teknis maupun non teknis agar mereka dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian output agar sesuai dengan trajectory yang telah ditetapkan.
- b) Menghimbau agar pelaksanaan kegiatan operasional maupun non operasional seperti perjalanan dinas agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan membatasi jumlah pegawai, jumlah hari, dan frekuensi perjalanan dinas.
- c) Melakukan simulasi perhitungan realisasi, output dan efisiensi anggaran sebagai gambaran kondisi yang harus dicapai agar target pada akhir tahun dapat tercapai.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan revisi anggaran dan rencana efisiensi target dapat tercapai.

2) Sub IKU (9a2-N) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Isu Utama

Realisasi capaian kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan ini terdiri dari 3 formula perhitungan yaitu Proses Pengajuan Sertifikasi, Pemanfaatan Aplikasi BMN, dan Pemanfaatan Sistem Pengadaan.

Capaian IKU ini juga melibatkan peran dari pihak eksternal (seperti Kantor Pertanahan untuk sertifikasi, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku pengelola Aplikasi e-Sewa BMN dan LKPP selaku pengelola Aplikasi Sistem Pengadaan, sehingga ada resiko target capaian tidak tercapai.

Implikasi

Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak tercapai.

Akar Masalah

- a) Terdapat 3 komponen formula perhitungan yang tidak terkait satu dengan lainnya sehingga berpotensi capaian IKU kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak maksimal.
- b) Adanya peran pihak eksternal guna mendukung tercapainya target IKU kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- a) Updating data Sertifikasi BMN pada Aplikasi SIMAN.
- b) Pengajuan user Aplikasi e-Sewa BMN ke Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Setjen Kemenkeu.
- c) Pengadaan Belanja Modal T.A. 2023 menggunakan e-purchasing.
- d) Penginputan data RUP T.A. 2023 pada Aplikasi SIRUP.

Rekomendasi Rencana Aksi

- a) Berkoordinasi dengan Seksi PKN KPKNL Jakarta II terkait Sertifikasi BMN.
- b) Menyiapkan data BMN yang akan diinput dalam aplikasi e-Sewa BMN.
- c) Monitoring penggunaan Sistem Pengadaan secara berkala.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Target	Realisasi
2019	95%	96,12%
2020	95%	95,97%
2021	95,5%	91,88%
2022	95,5%	91,54%
2023	100%	109%

b. (9b-N) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

9b-N	P/M	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MINI/TLK	15%	
			TRIWULANIAN		
		KPKNL Jakarta I		15%	1.00%
		KPKNL Jakarta II		15%	0.00%
		KPKNL Jakarta III		15%	0.44%
		KPKNL Jakarta IV		15%	0.00%
		KPKNL Jakarta V		15%	0.00%
		Kanwil DJKN DKI Jakarta (Deviasi Bea Lelang PL II)		15%	1.03%
		Target/Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional		15%	0.34%
		Capaian IKU Deviasi PNBP Fungsional DJKN			0.34%

Isu Utama

Selisih PNBP terlalu besar antara yang tercatat pada dropbox dengan PNBP yang tercatat pada aplikasi OM SPAN maupun selisih antara PNBP yang tercatat pada focus PN dengan PNBP yang tercatat pada OM SPAN Implikasi.

Implikasinya, pada triwulan I terjadi selisih data PNBP dengan rincian deviasi sebagai berikut:

- KPKNL Jakarta I dengan deviasi sebesar 0%.
- KPKNL Jakarta II dengan deviasi sebesar 0%.
- KPKNL Jakarta III dengan deviasi sebesar 5,21%.
- KPKNL Jakarta IV dengan deviasi sebesar 0%.
- KPKNL Jakarta V dengan deviasi sebesar 0%.
- Kanwil DJKN DKI Jakarta dengan deviasi sebesar 14,72%.

Akar Masalah

Adanya perbedaan pengakuan pencatatan tanggal antara tanggal penyetoran riil dengan tanggal yang tercatat pada Omspan khususnya untuk penyetoran yang dilakukan setelah pukul 14.00 WIB.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Koordinasi dengan Bendahara Penerima untuk bisa mendapatkan data dari Omspan jika ada perbedaan data.
- 2) Mencocokkan data antara Dropbox, Simponi dan Omspan.
- 3) Penginputan Dropbox secara berkala.

Rekomendasi Rencana Aksi

Cut off pembayaran pemenang lelang dan pembayaran piutang ditentukan pukul 14.00 WIB untuk mengantisipasi deviasi data PNBP.

Perbandingan Capaian IKU

Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	Target	Realisasi
2019	N/A	N/A
2020	N/A	N/A
2021	12,5%	0,15%
2022	10%	1,03%
2023	15%	0,34%

10. Sasaran Strategis : Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang efektif

SS. Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif			113,59%
10a1-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	81,74	136,23%
10a2-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120	120

(10a-N) Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif

10	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif			80	
	10a1-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Max/TLK	60
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	TAHUNAN	60
			Data Untuk Keperluan Monev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)		81.74
			KPKNL Jakarta I		99.81%
			KPKNL Jakarta II		94.61%
			KPKNL Jakarta III		89.19%
			KPKNL Jakarta IV		94.80%
			KPKNL Jakarta V		
			Capaian Sub IKU		81.74
	10a2-N	P/M	Nilai Pemanuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	Max/TLK	100
			Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBK/WBBM	TAHUNAN	100
			Capaian Sub IKU WBBM		100
			Data Untuk Keperluan Monev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)		
			KPKNL Jakarta I		100.00%
			KPKNL Jakarta II		90.00%
			KPKNL Jakarta III		100.00%
			KPKNL Jakarta IV		90.00%
			Capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang efektif		90.87

Isu Utama

Terdiri dari 2 Sub IKU, yaitu:

- 1) (10a1-N) Indeks Pengawasan Pengendalian yang Efektif (Target 60; Realisasi 81,74).
- 2) (10a2-N) Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM (Target 100; Realisasi 120).

Secara keseluruhan, IKU Utama memiliki Target 80 dan Realisasi 90,87.

Implikasi

Membutuhkan komitmen seluruh jajaran pegawai, serta waktu yang lama untuk pengumpulan dokumen kegiatan.

Akar Masalah

- 1) Dokumen dan kegiatan yang harus dipenuhi sangat banyak.
- 2) Sulitnya mengakses dokumen yang merupakan output unit lain.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melaksanakan kegiatan monev ZI WBBM secara rutin.
- 2) Membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai lintas bidang untuk pelaksanaan ZI WBBM dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Rekomendasi Rencana Aksi

Terus melaksanakan monev secara rutin, serta meningkatkan inovasi pada Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target	Realisasi
2019	95%	96,12%
2020	95%	95,97%
2021	95,5%	91,88%
2022	95,5%	91,54%
2023	100%	109%

B. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 9,417,416,000,- (sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp9,117,296,456,- (sembilan miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga saldo Rp 300,119,544,- (tiga ratus juta seratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Adapun rincian realisasi DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN KANWIL DJKN DKI JAKARTA				
S.D. 31 Desember Tahun 2023				
	PAGU	REALISASI	SALDO	%Realisasi
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-
BELANJA BARANG	8.833.510.000	8.534.996.456	298.513.544	96,62
BELANJA MODAL	583.906.000	582.300.000	1.606.000	99,72
TOTAL	9.417.416.000	9.117.296.456	300.119.544	96,81

Realisasi per Bagian/Bidang:

MONITORING RPD DAN REALISASI S.D 31 DESEMBER 2023				
	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%PENYERAPAN
BAGIAN UMUM	8.152.902.000	8.092.670.623	60.231.377	99,26
BIDANG PKN	754.093.000	630.582.573	123.510.427	83,62
BIDANG PENILAIAN	82.084.000	73.671.000	8.413.000	89,75
BIDANG PIUTANG NEGARA	217.294.000	134.960.036	82.333.964	62,11
BIDANG LELANG	177.789.000	152.544.699	25.244.301	85,80
BIDANG KIH	33.254.000	32.867.525	386.475	98,84
TOTAL	9.417.416.000	9.117.296.456	300.119.544	

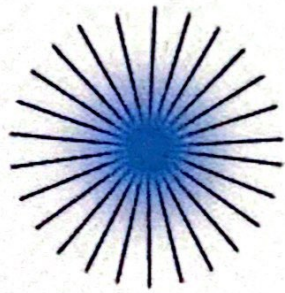
Capaian berdasarkan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang merupakan komposit dari 50% dari capaian berdasarkan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 50% dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu DJA (SmartDJA), adalah 93,94%.

CAPAIAN IKPA TA 2023 = 98,38

CAPAIAN SMART DJA TA 2023 = 89,50

CAPAIAN PKPA = 93,94

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta pada tahun 2023 secara umum dapat dikatakan berhasil/baik. Secara umum kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) dan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja mencapai 113,81% (memenuhi ekspektasi).
- b. Dari 20 IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2023, seluruh IKU dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi pemecahan masalah untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang akan diterapkan oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelayanan dan melakukan sosialisasi yang terus menerus terhadap *stakeholder* dan *customer*.
- b. Meningkatkan kompetensi para pegawai pada bidang-bidang teknis (bidang pengelolaan kekayaan negara dan bidang penilaian) dalam rangka pencapaian target Revaluasi BMN dan penilaian asset melalui diklat teknis maupun diklat penyegaran (*capacity building*).
- c. Bersama-sama dengan KPKNL melakukan penggalian potensi ke satker K/L untuk lebih meningkatkan optimalisasi aset.

- d. Meningkatkan capaian target pendapatan negara melalui lelang dan piutang Negara lebih sering dilakukan.
- e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada satker-satker di wilayah kerja.

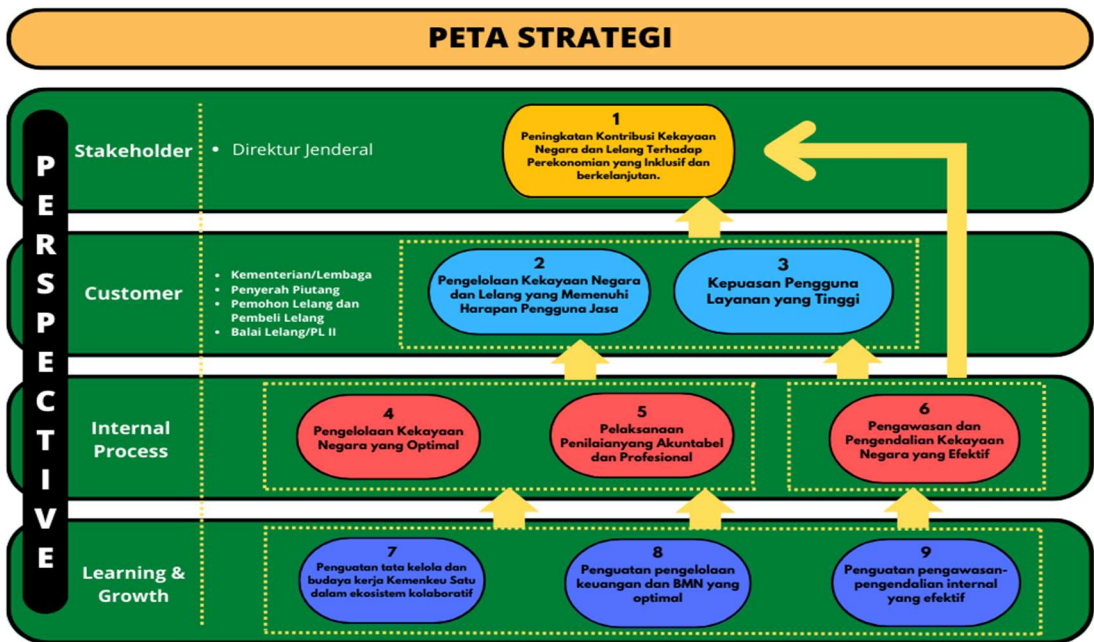
Semua yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dengan KPKNL Jakarta I sampai V yang berada di wilayah kerjanya, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Untuk itu agar selalu berkomitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun pada jajaran aparat di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah atau kebijakan untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

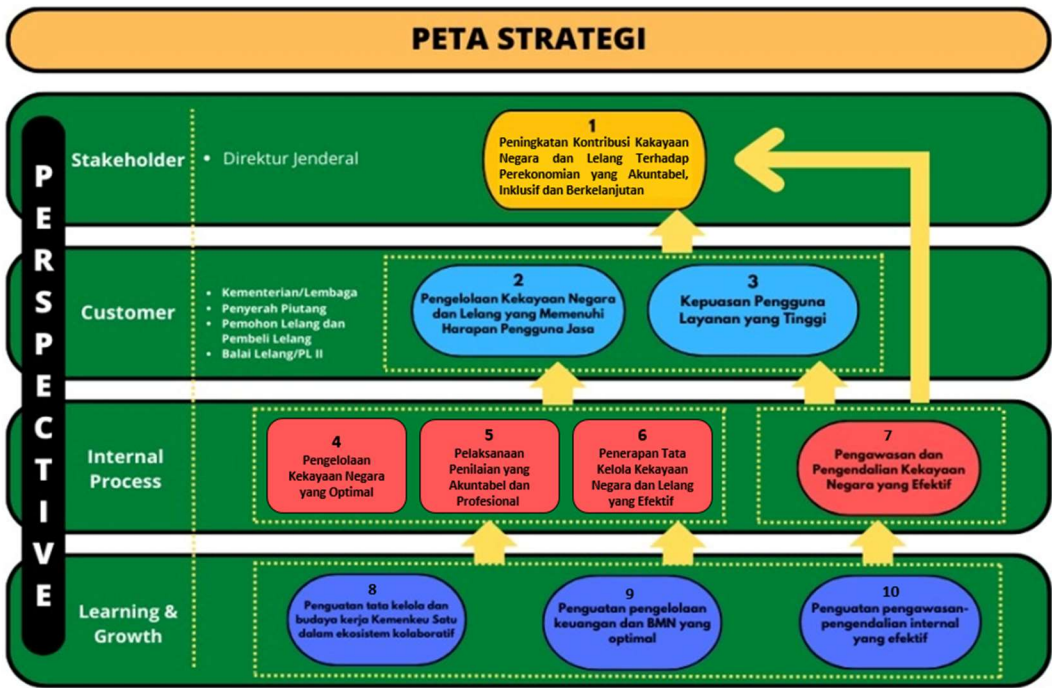
ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 19.1.A/KN/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-19/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan PK-19.1/KN/2023 tanggal 21 Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peta Strategis sebelum adendum:



b. Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Nomor SS	Nama Sasaran Strategis	Nomor SS	Nama Sasaran Strategis
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

b. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum	Menjadi		Penjelasan
	Kode SS	Sasaran Strategis	
-	<i>Internal process perspective</i>		Sasaran Strategis (SS) ditambahkan sebagai sasaran dari pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang dan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
	6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	

c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio)	6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
9a-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
Customer Perspective						Internal Process perspective					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
2C-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	78.5%	90%	90%	90%	6a-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang Online	78.5%	78.5%	90%	90%
2c1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	6a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
2c2-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%	6a2-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%

Internal Process perspective						Internal Process perspective					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
Internal Process perspective						Learning and growth perspective					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
2d-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	9b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

e. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
-	9a-N	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	100	100	100	100	IKU baru yang terdiri dari 2 Sub-IKU yaitu Sub-IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan Sub-IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

f. Perubahan IKU Menjadi Sub-IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.50	95.50	95.50	95.50	9a1-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%	9a2-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100 (100%)	100 (100%)

g. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta karena menjadi Sub IKU
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta karena menjadi Sub IKU
9a1-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	Sub IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta.

h. Perubahan Trajectory Target IKU dan Sub IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	86%	86%	7a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%
2c-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>	78.5%	90%	90%	90%	6a-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>	78.5%	78.5%	90%	90%
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	72.50 %	72.50 %	90%	90%	8c-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100
7a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	8c1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
7a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	72.50 %	72.50 %	90%	90%	8c2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	9b1-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	9b2-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

i. Perubahan Kode SS dan IKU atau Sub IKU

Kode SS/IKU		Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
6	7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
6a-N	7a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
7	8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
7a-N	8c-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu
7a1-CP	8c1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
7a2-N	8c2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah
7b-N	8d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
7c-N	8e-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
8	9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
9	10	Penguatan pengawasan - Pengendalian Internal yang efektif
9a2-N	10a1-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
9a3-N	10a2-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Jakarta, 22 September 2023
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



RINCIAN TARGET ADENDUM KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-N	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>	57%	67%	67%	78,5%	78,5%	90%	90%
	6a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	6a2-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang <i>online</i>	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
7a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	50%	-	50%	86%	86%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
8c-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		20	72,5	72,5	100	100	100	100
	8c1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
	8c2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20%	45%	45%	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
8d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	80	80
8e-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
9a-N	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara		100	100	100	100	100	100	100
	9a1-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	9a2-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100 (100%)	100 (100%)
9b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif								
10a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang Efektif		-	-	-	-	-	80	80
	10a1-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
	10a2-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, 22 September 2023
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta tanggal 01 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang		80%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		100%	
		Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>		90%	
		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	
		Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%	
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		100%	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		100%	
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	

Sebelum					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		86%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		95%	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	
8	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5	Penguatan Internal/ Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Integritas Organisasi		88,67	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas	100 (Level 4)	
		Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	60	
		Sub-IKI 3	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	
		Indeks Integritas	88,67	

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		100%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		100%	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		100%	
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>		90%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	
		Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%	
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		86%	Penguatan Internal/ Anggaran
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	
9	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Indeks Kualiatas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara		100	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
		Sub-IKI 2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100 (100%)	
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang Efektif		80	Penguatan Internal/ Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Pengawasan dan Pegendalian yang Efektif	60	
		Sub-IKI 2	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang		60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang		80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang		70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas		-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang		70%	70%	100%	100%
5	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>		78,5%	78,5%	90%	90%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		60%	60%	100%	100%
	Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	94%	94%	94%	6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan		11%	11%	100%	100%
	Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	63%	63%	86%	86%	7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		55%	55%	68%	68%
6	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%	8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		60%	60%	100%	100%
7	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan		11%	11%	100%	100%	9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		60%	60%	100%	100%
8	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		55%	55%	68%	68%	10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	25%	25%	25%

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		60%	60%	100%	100%	11	Rata-rata Indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien		70	70	70	70
10	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		60%	60%	100%	100%	12	Tingkat Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>		78,5%	78,5%	90%	90%
11	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		75%	75%	100%	100%		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	25%	25%	25%		Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan permohonan lelang <i>online</i>	63%	63%	86%	86%
13	Rata-rata Indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien		70	70	70	70	13	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		75%	75%	100%	100%
14	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	-	86%	86%	14	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50%	50%	86%	86%
15	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		72,5%	72,5%	100%	100%	15	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100
	Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
	Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	72,5%	72,5%	90%	90%		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
16	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	80	80	16	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	80	80
17	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		75%	75%	100%	100%	17	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		75%	75%	100%	100%
18	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5	95,5	95,5	95,5	18	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara		100	100	100	100

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
19	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		85%	85%	100%	100%		Sub-IKI 1	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
20	Indeks Organisasi		-	-	88,67	88,67		Sub-IKI 2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100 (100%)	100 (100%)
	Sub-IKI 1	Indeks Integritas	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)	19	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%
	Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	60	60	20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	80	80
	Sub-IKI 3	Tingkat Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI WBK			100	100		Sub-IKI 1	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	60	60
								Sub-IKI 2	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/ WBBM	-	-	100	100

C. Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah

